

URGENSITAS FILSAFAT DALAM MEREDAM POLITIK PECAH BELAH DI ERA DIGITAL

Oleh : Bernardus Badj

Abstrak: Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah filsafat politik di era digital. Tujuannya untuk membuktikan dan menanggapi pernyataan dari Stephen Hawking dalam bukunya “A Brief History Of Time” yang mengklaim bahwa filsafat sudah jauh ketinggalan zaman karena tidak bisa mengejar kemajuan teknologi dan sains terutama fisika dan secara tradisional filsafat mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental karena filsafat sudah mati. Hal ini perlu dibuktikan bahwa sains tidak bisa berkembang tanpa filsafat, dan teknologi tidak mungkin berkembang tanpa sains, sebaliknya sains akan menjadi mandul atau tidak bernilai praktis kalau tanpa teknologi dan filsafat. Artinya bahwa filsafat, teknologi, dan sains harus berjalan bersama-sama. Jadi, filsafat menjadi peranan aktif dalam kenyataan dan usaha untuk mengubah kenyataan menjadi lebih baik, lebih bijak, dan memperbaharui kehidupan. Ada tiga pertanyaan yang akan dijawab pada pendahuluan yakni mengapa filsafat dianggap remeh oleh Hawking? Mengapa filsafat masih dibutuhkan untuk meredam politik pecah belah di era digital? Bagaimana filsafat mentransformasi diri sehingga bisa tetap eksis di era digital? Kontribusi dari tulisan untuk konsientisasi bahwa filsafat masih urgen di era digital dan tetap aktual sepanjang masa.

Kata Kunci: Stephen Hawking, Filsafat, Politik, dan Teknologi.

Semua filsafat kompeten untuk segala hal; lalu filsafat kompeten untuk beberapa hal; akhirnya filsafat hanya kompeten untuk satu hal yaitu untuk pengakuan inkompetensinya (Odo Marquard).¹

1. Pendahuluan

Maraknya perkembangan teknologi, para politisi benar-benar memanfaatkannya untuk bisa menjaring pemilih, berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sekaligus membentuk perbincangan yang akrab dengan masyarakat. Tetapi di sisi lain, para politisi menggunakan media sosial untuk mempropogandakan pertanyaan-pertanyaan kontraversial dan penuh kepalsuan dengan cara yang menarik, sehingga meyakinkan publik bahwa ada kebenaran dibaliknyanya dan memprovoasi masyarakat untuk pecah-belah. Di sini politik bukan lagi dimengerti sebagai suatu panggilan untuk terlibat dalam usaha mensejahterakan dan menciptakan situasi politik yang kondusif dalam kehidupan masyarakat, melainkan politik membuat

¹ Franz Magnis-Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 245.

elemen-elemen masyarakat terpecah belah. Bertitik tolak dari kenyataan ini, filsafat praktis atau etika mempertanyakan tanggung jawab manusia dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara. Jadi, filsafat membantu kita untuk lebih bijaksana dan teliti dalam berpikir dan bertindak.

Quo Vadis Filsafat? Filsafat selama sejarahnya tiga kali mengalami ketiadaan sebuah kompetensi. *Pertama* kompetensi soteriologi dalam tradisi Plato, filsafat adalah ajaran keselamatan. Dengan masuknya agama-agama, terutama agama Wahyu di panggung sejarah, filsafat ternyata tidak dapat menyaingi mereka sebagai penawar keselamatan. Ia hanya dapat bertahan sebagai “*ancilla theologiae*” (pelayan teologi). *Kedua* kompetensi filsafat sebagai ilmu universal. Dengan munculnya ilmu-ilmu moderen, filsafat merosot menjadi “*ancilla scientiae*” (pelayan ilmu pengetahuan). *Ketiga* kompetensi filsafat. Akhirnya filsafat juga tidak memenuhi harapan bahwa ia mampu menciptakan tatanan yang lebih adil. Filsafat bertahan sekedar sebagai “*ancilla emantipationis*”, sebagai filsafat sejarah emansipasi manusia.² Marquard telah membuat kapling terhadap filsafat sebagai *ancilla theologiae*, dan *ancilla emantipationis*. Berhadapan dengan sejumlah skeptisisme dan penolakan seperti filsafat Stephen Hawking, perlu ditegaskan bahwa filsafat menjadi garam dan terang bagi kaum intelektual.

Tujuan dari tulisan ini untuk membuktikan dan menanggapi pernyataan dari Stephen Hawking dalam bukunya “*A Brief History Of Time*” yang mengklaim bahwa filsafat sudah mati. Oleh karena itu, ada tiga pertanyaan yang mau dijawab pada pendahuluan ini yakni mengapa filsafat dianggap remeh oleh Hawking? Mengapa filsafat masih dibutuhkan untuk meredam politik pecah belah di era digital? Bagaimana filsafat mentransformasi diri sehingga bisa tetap eksis di era digital?

Pertama Hawking menganggap remeh filsafat karena menurutnya, filsafat sudah jauh ketinggalan zaman karena tidak bisa mengejar kemajuan teknologi dan sains terutama fisika. Selain itu ia juga memiliki pandangan yang sama dengan Nietzsche yang mengklaim tentang kematian Tuhan. Bertolak dari pernyataan ini Hawking juga memproklamkan tentang kematian filsafat karena ia percaya bahwa sia-sia bagi filsafat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental dalam hidup manusia.³ *Kedua*, filsafat masih dibutuhkan untuk meredam politik pecah belah di era digital karena, sangat pentinglah menerapkan pola pikir filsafat untuk memproyeksikan kemungkinan-kemungkinan baru pemakaian teknologi digital untuk meningkatkan kemanusiaan, yaitu seperti kreativitas, kebebasan, dan moralitas.

² *Ibid.*, hlm. 245-246.

³ Syamsuar Hamka, “Studi Kritis Pemikiran Fisika Modern Stephen Hawking Menurut Filsafat Pendidikan Islam”, *Tawazun Jurnal Pendidikan Islam*, 12: 1 (Makasar: Juni, 2019), hlm. 7.

Namun, filsafat juga harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang sejauh mana teknologi digital dapat mendegradasi kemanusiaan kita sampai ke taraf mesin.

Ketiga. Bagaimana filsafat mentransformasi diri sehingga bisa tetap eksis di era digital ? filsafat selalu eksis. Sains tidak bisa berjalan tanpa filsafat, dan teknologi tidak mungkin berkembang tanpa sains, sebaliknya sains akan menjadi mandul atau tidak bernilai praktis kalau tanpa teknologi dan filsafat.⁴ Artinya bahwa filsafat, teknologi, dan sains harus berjalan bersama-sama. Filsafat bertugas untuk menyertai sains. Filsafat bukan ratu ilmu, bukan juga abdinya, bukan petunjuk jalan, dan juga bukan penyedia metode. Ia menyertai saja, artinya bahwa menyertai dengan komentar, catatan, kritikan, dan ulasan-ulasannya. Ia menawarkan wawasannya yang melampaui keterbatasan metode masing-masing ilmu dan dengan demikian ia membuka *intellectual space* para ilmuwan untuk mengakses perubahan metode sampai pada perubahan metode.⁵ Sebagai contoh dapat diambil pengaruh filsafat dalam pengembangan fisika mikro serta teori relativitas yang seandainya dua-duanya tanpa wawasan dan keberanian filosofis, terutama epistemologi tidak mungkin akan dirumuskan.

Filsafat menjadi peranan aktif dalam kenyataan dan usaha untuk mengubah kenyataan menjadi lebih baik dan lebih bijak, ini merupakan pilihan dasariah dalam berfilsafat. Karena itu, pilihan jenis atau model filsafat, termasuk metode, sistem, pahaman dan lain-lain, bukan tanpa pengaruh yang nyata dalam kehidupan. Pilihan itu akan menentukan arah hidup kita, menentukan bentuk keterlibatan aktif kita dengan yang lain, serta peranan aktif kita dalam memperbaharui kehidupan.

2. Politik Pecah Belah dan Krisis Moralitas Bangsa di Era Digital

2.1. Politik Pecah Belah

Perkembangan teknologi yang begitu cepat hingga merasuk di seluruh kehidupan sosial masyarakat, ternyata bukan saja mengubah tatanan kehidupan sosial, budaya masyarakat tetapi juga kehidupan politik. Kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh manusia benar-benar dimanfaatkan oleh para politisi yang ingin meraih simpati, dan empati dari masyarakat luas. Untuk menaikan elektabilitas dan popularitas dapat dilakukan dengan fasilitas digital seperti salah satunya *smartphone*

⁴ Yosep Keladu Koten, "Berwaspada Bersama Paus", Jurnal Ledalero, 6:2 (Ledalero, Desember 2007), hlm. 227.

⁵ Franz Magnis-Suseno, Pijar-pijar Filsafat (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), hlm. 36.

yang disediakan fitur/aplikasi canggih yang terhubung langsung ke jejaring sosial yang mampu menghubungkan antara individu yang satu dengan yang lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya bahkan negara yang memberikan dampak besar dalam politik digital. Mekanisme elektronik juga telah mengubah aktivitas dalam pemilihan seperti kampanye berbasis internet, website-website, email dan podcast.⁶

Kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh manusia benar-benar dimanfaatkan oleh para politisi untuk mengakses informasi secara cepat dan akurat dalam merealisasikan setiap pekerjaan, di satu sisi para politisi menggunakan teknologi untuk memanipulasi sesama warga bangsa agar terpecah belah. Politik ini menghasut di antara sesama warga negara Indonesia untuk saling melakukan perlawanan dan pertentangan, bahkan konflik dan pertikaian hingga melunturkan dan menghancurkan identitas nasional. Politik pecah belah, atau *de vide et impera*⁷ bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat.

Ketika tidak adanya persatuan dan kesatuan di kalangan bangsa Indonesia dan didukung oleh keragaman bangsa Indonesia maka kondisi ini mudah dieksploitasi dengan politik pecah belah atau politik adu domba. Politik pecah belah tersebut hanya akan meninggalkan kebencian dan dendam yang semakin berakar kuat di antara sesama masyarakat Indonesia sehingga permusuhan dan perlawanan satu sama lain untuk saling menyalahkan merupakan sikap yang ditempuh. Bangsa Indonesia pasti saja terlibat dalam perang saudara. Korbannya adalah bangsa Indonesia, sementara musuh yang sebenarnya terus menikmati perpecahan dan kehancuran bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Filsafat mendorong manusia-manusia Indonesia untuk bersikap terbuka dan rasional. Sebagai perisai akal budi, filsafat memacu manusia Indonesia untuk memikirkan kembali masalah-masalah yang telah dilakukan oleh para politisi di atas secara rasional yang bisa dimengerti oleh semua orang.

⁶ Agus Sudibyo, "Eksistensi Media Masa Nasional", Kompas 12 Februari 2018.

⁷ *De vide et impera* yang artinya politik adu domba. Awalnya, politik pecah belah merupakan strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis mulai pada abad 15 (Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Prancis). Bangsa-bangsa tersebut melakukan ekspansi dan penaklukan untuk mencari sumber-sumber kekayaan alam, terutama di wilayah tropis. Seiring dengan waktu, metode penaklukan mereka mengalami perkembangan, sehingga politik pecah belah tidak lagi sekadar sebagai strategi perang namun lebih menjadi strategi politik. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm.45.

Dengan demikian manusia Indonesia bisa berpikir lebih jernih dalam menyelesaikan politik pecah belah ini. Oleh karena itu, filsafat menyingkapkan manusia sebagai makhluk rasional.

2.2. Krisis Moralitas Bangsa

Politik pecah belah merupakan musuh bersama semua warga masyarakat Indonesia. Hal ini beralasan karena Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan bersifat majemuk baik suku, agama, ras maupun golongan mudah dan rentan terpecah belah sebagai satu bangsa dan negara. Kurangnya kesadaran akan kemajemukan dan kondisi demikian dalam diri setiap warga masyarakat, dapat melanggengkan politik pecah belah terus terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai satu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang majemuk ini mendiami kepulauan Nusantara yang tersebar di 17.508 buah pulau besar dan kecil, berada di antara dua samudra dan dua benua dapat bersatu menjadi satu bangsa. Hal ini sulit dibayangkan.⁸ Oleh karena itu, sangat mudah diprovokasi melalui politik pecah belah agar hancur berantakan. Pengalaman ini telah tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia yang sangat panjang ketika dijajah oleh bangsa Hindia Belanda selama kurang lebih tiga ratus lima puluh tahun.

Sejarah kelam tersebut telah membuat bangsa Indonesia sangat menderita dan sengsara. Semua rakyat Indonesia mengalami krisis kemiskinan dan kebodohan karena adu domba yang dilancarkan oleh bangsa penjajah.⁹ Penderitaan rakyat Indonesia semakin meluas karena tidak adanya kebebasan dan kemerdekaan untuk hidup layak sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Pengalaman tersebut harus menyadarkan segenap masyarakat Indonesia agar tidak membiarkan politik pecah belah tetap berlangsung hingga era digital ini, walaupun Indonesia telah merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara.

Politik pecah belah di antara sesama anak bangsa adalah sebuah bentuk penyimpangan moral. Moralitas bangsa yang seharusnya dipergunakan untuk memperjuangkan kebaikan dan keadilan bagi kesejahteraan semua warga bangsa, bukan dialihkan untuk memenuhi kepentingan segelintir orang apalagi di era digital ini. Teknologi secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi

⁸ Zainul Ittihad Amin, Buku Materi Pokok MKDU4111, Pendidikan Kewarganegaraan (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), hlm 21.

⁹ Budi Susanto, ed., Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 9.

perkembangan moral.¹⁰ Seseorang dapat berperilaku buruk akibat penggunaan teknologi yang tidak pada tempatnya. Meleburnya norma dan nilai di dalam kehidupan masyarakat akibat teknologi membuat warga masyarakat tidak lagi mengindahkan kebaikan dan keadilan untuk kepentingan umum.¹¹

Moralitas masyarakat di negeri ini semakin hari semakin mengkhawatirkan. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan moral tidak habis-habisnya terjadi di negeri ini, pelakunya mulai dari rakyat kecil hingga pejabat. Setiap hari media massa tidak pernah kehabisan berita tentang perilaku masyarakat. Berbagai kasus seperti korupsi, penipuan sampai pada tindakan asusila yang terjadi akhir-akhir ini banyak sekali melibatkan semua elemen masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa banyak orang memiliki moralitas yang buruk.

Banyak perilaku yang menunjukkan terjadi kemerosotan moralitas pada diri masyarakat Indonesia. Pada masa kini, masyarakat Indonesia telah mengalami hilangnya sikap sopan-santun dan lebih menggunakan pola-pola modern agar tidak disebut ketinggalan zaman. Masyarakat yang telah dirasuki ketamakan, terutama mempunyai kekuatan dan pengaruh, tidak akan ragu-ragu dalam memakai segala cara untuk mencapai tujuannya di era digital sekarang. Penurunan kualitas moralitas bangsa tersebut juga dapat disebabkan karena lemahnya mental anak bangsa yang terbentuk sejak dini, sehingga membentuk karakter yang kurang baik. Karakter tersebut akan menjadi watak perilaku seseorang dalam menjalani kehidupannya bersama warga masyarakat. Oleh karena itu, politik pecah belah merupakan musuh bersama yang harus, dikritik, diperangi dan dibasmi serta diredam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era digital ini.

3. Urgensitas Filsafat di Era Digital Untuk Meredam Politik Pecah Belah

Berdasarkan hal tersebut, filsafat dipakai untuk meredam politik pecah belah di tanah air. Hal tersebut dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut :

3.1 Filsafat Dapat Melawan Hoaks

Propagandis Nazi pernah berujar: Kebohongan yang terus menerus diulang akan menjadi kebenaran. Perkembangan era digital dewasa ini ditandai dengan

¹⁰ Eddy Kristiyanto, ed., *Etika Politik dalam Konteks Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), hlm.19.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 21.

semakin masifnya penetrasi media sosial dalam berbagai aspek kehidupan¹² salah satunya di bidang politik. Nathaniel Persily pernah mengatakan bahwa:

Social media came into the world not as an organ of the free press, not as news and information services, not as the mediator between citizen and state, and not even as a mediator between citizens and citizen, but as a fun way for people to socialize (and, it turns out, a good way to make money). Their epistemic role and function as transmitters of important facts about what is going on the world, including the world of politics, was an unintended development. Perhaps this role could have been predicted, but it is not what they were designed, or apparently prepared, for. Reluctantly or not, these platforms are the new intermediary institutions for our present politics. The traditional organizations of political parties and the legacy media will not reemerge for the Internet age in anything like their prior incarnations.

13

Dengan demikian, media sosial dimengerti sebagai alat yang digunakan oleh masyarakat untuk bersosialisasi, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu serta campur tangan orang lain. Tetapi dapat membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya media sosial berkontribusi dalam menyediakan informasi secara cepat dan akurat. Dampak negatifnya baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dalam hal penyebaran ideologi radikal, pornografi, perdagangan narkoba, organized crime, hoaks dan aktivitas negatif lainnya dapat melunturkan ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar terpecah belah.

Hoaks akan menjadi bagian integral dari strategi dalam perusahaan media sosial yang cenderung bersifat instrumentalistik menghadapi persoalan hoaks dan politik. Seperti digambarkan Evgeny Morozov dalam tulisan berjudul “*Moral panic over fake news hides the real enemy-the digital giants*” bagi perusahaan media sosial tidak penting apa dampak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dan apa dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa.¹⁴

¹² Agus Sudibyo, “Melawan Hoks”, Kompas 20 November 2017.

¹³ Simone Chambers, “Truth, Deliberative Democracy, and the Virtues of Accuracy: Is Fake News Destroying the Public Sphere?”, *Journal of Political Study Association*, 28:2 (California, 2020), pp. 151.

¹⁴ Agus Sudibyo., *lo.cit.*

Bertitik tolak dari masalah-masalah di atas, maka kita dituntut untuk berpikir lebih kritis. Maka sangat pentinglah kita menerapkan pola pikir filsafat untuk melawan hoax di media sosial. Secara umum filsafat adalah suatu ilmu yang mengajarkan manusia untuk berpikir secara logis, radikal, kritis, dan sistematis. Filsafat juga mengajarkan kepada kita untuk berfikir kritis, artinya di era yang serba maju dan berkembang ini, maka berbagai informasi begitu mudah tersebar luas, maka dari itu kita harus mampu menelaah informasi-informasi tersebut dengan lebih kritis dan menelaah dulu akan kebenarannya, jadi kita tidak akan langsung menerima saja berita-berita yang ada, tanpa tahu dulu kebenarannya secara pasti. Dengan demikian politik pecah belah bisa diatasi dengan cara melawan hoaks di media sosial.

3.2. Filsafat Berperan Dalam Membangun Basis Argumentasi dari Upaya Pembumian Pancasila

Pendidikan karakter bangsa melalui pembumian Pancasila kepada segenap lapisan masyarakat agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh kegiatan politik pecah belah yang dilancarkan oleh individu atau kelompok politik tertentu dalam memenuhi ambisi pribadinya masing-masing. Pembumian Pancasila merupakan suatu upaya penguatan moralitas bangsa di era digital. Hal ini diarahkan supaya nilai-nilai Pancasila sebagai moralitas bangsa tetap berakar kuat di dalam diri setiap warga masyarakat. Jika nilai-nilai Pancasila semakin berakar di dalam diri setiap warga masyarakat maka terbentuklah karakter dan patriotisme seluruh masyarakat Indonesia tanpa dapat tercerabut baik oleh teknologi maupun oleh politik pecah belah.

Pendidikan karakter bangsa tersebut dapat menghidupkan dan mengokohkan kembali semangat nasionalisme yang mulai kendor dan lemah karena politik pecah belah yang dilakukan oleh segelintir warga masyarakat. Setiap warga negara adalah penentu kadar nasionalisme bagi bangsa dan negaranya. Nasionalisme pada era digital ini sesungguhnya berakar dan berkembang dari persepsi individu warga negara terhadap negara. Jika persepsinya baik maka kecintaan terhadap bangsa dan negara tetap terjaga sehingga politik pecah belah tidak akan melemahkan sendi-sendi negara.

15

Pentingnya belajar filsafat Pancasila sebagai kekhasan filsafat Indonesia. Pancasila yang sebagai ideologi negara mempersatukan bangsa dan negara Indonesia yang multikulturalisme ini. Secara mendetail RFN 24 mengemukakan hal-hal berikut berkaitan dengan unsur-unsur filsafat di dalam kelima sila Pancasila:

¹⁵ M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986), hlm. 44.

Inti sila Ketuhanan yang Mahaesa ialah pengakuan akan adanya Makhluk Tertinggi, yang dapat merangkum bermacam-macam agama dan kepercayaan. Sila Kemanusiaan yang adil dapat diberi ulasan melalui filsafat manusia yang modern tentang hubungan antar manusia, martabat pribadi manusia, nilai kerja manusia dan etika kerja. Sila Persatuan Indonesia dapat dibahas dalam filsafat sosial-politik, filsafat sejarah, dan filsafat kebudayaan. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan perlu didasari dengan filsafat negara dan dijelaskan dengan membahas beberapa sistem pemerintahan: etika politik, HAM dan lain sebagainya. Sila Keadilan sosial mendapat sorotan dari filsafat manusia: manusia sebagai warga individu dan sebagai warga masyarakat.¹⁶

Jadi jelas bahwa pendidikan karakter bangsa melalui pembumian Pancasila merupakan suatu bentuk penguatan moralitas bangsa di era digital ini agar dapat mengatasi politik pecah belah yang menyuburkan kecurigaan dan salah persepsi di antara sesama warga masyarakat.

1.1. Urgensitas Filsafat Dalam Membangun Dialog Antaragama

Jürgen Habermas mencoba untuk menerapkan teori rasionalitas komunikatifnya dalam pandangan tentang dialog agama dan sekularisasi guna untuk mengatasi konflik antarbudaya dan ideologi serta menciptakan perdamaian global. Tujuan dialog adalah menjelaskan rasionalitas kehidupan bersama sehingga semua orang bisa setuju atau mencapai mencapai konsensus nasional.¹⁷ Artinya bahwa membangun dialog antar agama akan menjadi media pertukaran ide, informasi dan pengetahuan tentang usaha belah negara bagi kepentingan bersama (*Bounum Commune*).

Filsafat Perennial Seyyed Hossein Nasr menggambarkan tujuh daratan dialog antar agama yang berhubungan satu sama lain. Daratan dialog itu dapat dilihat sebagai langkah-langkah yang fleksibel dan dapat melompat. Dataran-dataran dialog itu juga dapat disebut momen-momen dialog sebab usaha dan tindakan berdialog umumnya tidak berangkat dari titik nol. Dialog juga dapat dilaksanakan pada dataran mana saja yang mungkin pada lingkungan dan waktu tertentu. Dataran-dataran atau momen-momen itu dapat digambarkan sebagai berikut: *pertama* dialog kehidupan, *kedua* analisis sosial dan refleksi etis kontekstual, *ketiga* studi tradisi-tradisi agama (saya sendiri dalam komunitas agama saya sendiri), *keempat* dialog antar umat

¹⁶ Robert Minsel "Membentuk Imam Berkualitas Lewat Filsafat Menurut *Ratio Fundamental* *Nationalis*, 1987", Jurnal Ledalero, 4:2 (Ledalero, Desember, 2005), hlm 17-18.

¹⁷ Otto Gusti Madung, Politik Antara Legalitas dan Moralitas (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2009), hlm. 34.

beragama: berbagai iman dalam level pengalaman, *kelima* dialog antarumat beragama berteologi lintas agama, *keenam* dialog aksi, dan *ketujuh* dialog intraagama.¹⁸

Bertitik tolak dari penjelasan di atas dapat menarik kesimpulan bahwa dialog antaragama merupakan salah satu media yang paling ampuh untuk menguatkan moralitas bangsa di era digital ini guna untuk meredam politik pecah belah di dalam negeri. Dialog antaragama dipandang sebagai jalan yang paling tepat untuk meningkatkan semangat nasionalisme. Alasannya karena, dialog antaragama merupakan titik simpul atau titik temu dari semua perbedaan politik yang terjadi. Filsafat menawarkan sikap yang memungkinkan dialog agama lebih serius dan membuahkan hasil. Dengan filsafat orang dapat membangun dialog dengan berbekal integritas yang jelas dan keterbukaan yang tulus untuk berlangsungnya saling memahami satu sama lain.

Dialog antaragama juga dapat membantu setiap warga masyarakat untuk membentuk dan menumbuhkan semangat hidup bersama dalam kemajemukan. Dalam dialog antaragama ini, setiap warga masyarakat diajak dan disadarkan untuk dapat menerima pilihan politik yang berbeda bahkan dapat melihat kehidupan bersama sebagai satu bangsa dalam wawasan yang lebih luas dan perpektif yang semakin variatif dalam nuansa dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, politik pecah belah yang coba dilakukan oleh segelintir orang, tidak dapat mempengaruhi dan menghancurkan bangsa dan negara Indonesia sebagai satu kesatuan.

1.1. Urgensitas Filsafat Dalam Kebenaran Berpolitik

Belajar berfilsafat bukanlah suatu usaha yang sia-sia tetapi berguna untuk mengenal identitas diri sebagaimana yang diperingatkan Socrates "*gnōti seauton*" (kenalilah dirimu) dan mengabdikan pada kebenaran yang membebaskan umat manusia. Fakta menunjukkan bahwa kebenaran selalu tidak menyenangkan. Oleh karena itu, orang-orang yang menggeluti filsafat harus berani menyurakan kebenaran.

Urgensi kebenaran dalam dunia politik sudah diingatkan oleh Plato. Karena itu, Plato menganjurkan model filsuf (pencinta kebijakan dan kebenaran) sebagai raja. Dalam karyanya *Politeia* (Republik) Plato menulis:

¹⁸ Dwi Wahyuni, dkk. "Filsafat Perennial Dan Dialog Agama: Studi Pemikiran Seyyed Hossein Nasr" Jurnal Al-Aqidah, 13:1 (Padang: Juni 2021), hlm. 114.

Jika para filsuf tidak menjadi raja di Negara-negara atau para raja dan pemangku kekuasaan politik tidak mempelajari filsafat secara serius dan mendasar, dan keduanya yakni filsafat dan kekuasaan Negara tak berkelindan satu sama lain, maka bencana tanpa akhir akan menimpa negara-negara dan juga seluruh umat manusia.¹⁹

Jadi, para politisi yang menyebarkan hoaks dan memanipulasi masyarakat merupakan suatu musibah besar yang melanda kehidupan masyarakat. Menurut Hannah Arendt kebenaran faktual itu musuh demokrasi. Sebab kebenaran menurutnya selalu berfifat destopik. *“it may be the nature of the political realm to be at war with truth in all its forms, and hence to the question of why a commitment even to factual truth is felt to be anti-political attitude”*.²⁰ Hannah Arendt berpendangan bahwa klain kebenaran merupakan hambatan bagi diskusi dan membungkum kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, kebenaran dalam dunia politik harus membuat warga negara demokratis berbahagia. Bukti untuk kaitan antara kebenaran dan kebahagiaan ini mudah untuk diberikan walaupun tidak secara moral atau eksistensial, sekurangnya secara politis.²¹ Negara-negara demokratis yang terlatih untuk menghargai fakta, moralitas, dan transparansi terbukti lebih sejahtera daripada mereka yang terjebak dalam kemelut konflik ideologi, propaganda agama, dan kleptokrasi.

Kemajuan pers dan sains, meningkatnya akuntabilitas publik, dan kepercayaan timbal balik sebagai hasil transparansi memang tidak menjamin kebahagiaan subyektif tiap orang. Bunuh diri banyak terjadi di negara-negara maju. Negara memang tidak perlu membahagiakan setiap orang. Selain mustahil, hal itu juga berlebihan karena akan muncul paksaan tak membahagiakan untuk berbahagia. Yang perlu dilakukan negara dan para politikus adalah menciptakan kondisi-kondisi untuk bahagia, dan hal itu mustahil terwujud tanpa minat terhadap kebenaran.²²

Bertolak dari penjelasan di atas, negara dan para politikus wajib menarik minat para pendukung mereka terhadap kebenaran sehingga peluang kesejahteraan sosial menjadi lebih besar. Tetapi ada minat akan kebenaran berbeda dari memiliki

¹⁹ Otto Gusti madung, “Demokrasi dan Kebenaran”, dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, Herlambang P. Wiratraman (ed.), *Refleksi 100 Ilmuan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia* (Depok: Pustaka LP3ES, 2021), hlm. 894-895.

²⁰ *Ibid.*

²¹ F. Budi Hardiman, “Pentingnya Kebenaran”, Kompas 30 November 2018.

²² M. Risfan Sihaholo, “Politik Kebenaran dalam Konteks dan Kekuasaan”, <https://tajdid.id/2021/09/14/kebenaran-dalam-konteks-politik-dan-kekuasaan/>, diakses 21 Februari 2020.

kebenaran. Para antusias politis dan religius yang berteriak-teriak mengklaim memiliki kebenaran sesungguhnya tidak meminati kebenaran. Mereka memaksa orang lain bahagia menurut cara mereka.²³

Arogansi seperti ini justru mengancam bukan hanya kebahagiaan orang lain, melainkan juga diri mereka sendiri. Kebahagiaan tidak datang dari paksaan kebenaran, tetapi dari penemuan kebenaran lewat kebebasan. Kebebasan itulah yang mengantarkan pada kebenaran yang tidak terlalu dini untuk dikatakan. "Kebenaran", demikian *Voltaire*, "adalah buah yang hanya boleh dipetik saat matang".²⁴ Hal ini merupakan kristalisasi dari hakekat filsafat sebagai usaha mencari terus-menerus untuk memperoleh kebenaran.

2. Penutup

Politik pecah belah dalam pandangan bangsa Indonesia saat ini dapat menjadi suatu ancaman bagi nasionalisme. Selain digital, ancaman lain yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa ialah instabilitas di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Namun bidang yang saat ini sedang gencar di tengah masyarakat adalah kegiatan politik. Situasi politik nasional dalam negeri sedang tidak stabil karena adanya adu domba di antara para politisi dan masyarakat selaku pendukungnya. Kegiatan politik warga bangsa tidak bersandar pada moralitas politik yang seharusnya. Politik pecah belah dipergunakan oleh individu atau kelompok politik tertentu sebagai cara yang tepat untuk mewujudkan kepentingan politiknya. Upaya tersebut dapat mempengaruhi segenap lapisan masyarakat untuk saling mencurigai. Hal tersebut dapat menimbulkan keresahan sosial dan konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga ancaman bagi nasionalisme tidak dapat dielakkan di era digital ini. Berdasarkan hal tersebut, filsafat dipakai untuk meredam politik pecah belah di era digital ini.

Menurut Hubert Marcuse, manfaat filsafat ialah memberikan kritik terhadap apa yang ada (*criticism of what exist*). Filsafat melatih dan mendidik manusia untuk berpikir kritis terhadap segala realitas yang ada. Iktiar filsafat adalah mengabdikan pada kebenaran yang membebaskan. Kembali kepada pernyataan Stephen Hawking yang mengatakan bahwa filsafat sudah jauh ketinggalan zaman karena tidak bisa mengejar kemajuan teknologi dan sains terutama fisika, jadi filsafat sudah mati. Hal ini perlu dibuktikan bahwa sains tidak bisa berkembang tanpa filsafat, dan teknologi tidak mungkin berkembang tanpa sains, sebaliknya sains akan menjadi mandul atau tidak

²³ *Ibid.*

²⁴ F. Budi Hardiman, *loc. cit.*

bernilai praktis kalau tanpa teknologi dan filsafat. Artinya bahwa filsafat, teknologi, dan sains harus berjalan bersama-sama. Hemat penulis, filsafat sebagai ilmu kritis masih dan akan tetap relevan dan aktual sepanjang sejarah manusia karena filsafat berpegang pada nilai rasionalitas dalam artinya bahwa filosofis menuntut pertanggungjawaban terhadap klain-klain dalam bidang kognitif, normatif, dan estetik. Filsafat menyediakan diskursus tentang pertanggungjawaban itu.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Budiardjo, M. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986.

Ittihad Amin, Zainul. 2016. Buku Materi Pokok, MKDU4111, Pendidikan Kewarganegaraan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Kristiyanto, Eddy, ed. Etika Politik dalam Konteks Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.

Madung, Otto Gusti. Politik Antara Legalitas dan Moralitas Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.

_____. Demokrasi dan Kebenaran, dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, Herlambang P. Wiratraman (ed.), Refleksi 100 Ilmuan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia Depok: Pustaka LP3ES, 2021.

Magnis-Suseno, Franz. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

_____. Pijar-pijar Filsafat Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.

Susanto, Budi, ed. Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.

Suminto, Aqib. Politik Islam Hindia Belanda Jakarta: LP3ES, 1994.

Internet dan Majalah

Raharjo Jati, Wisisto. "Hoaks Sebagai Komoditas Politik"
<https://www.kompas.id/baca/opini/2018/06/18/hoaks-sebagai-komoditas-politik>, diakses pada 25 Februari 2022.

Sihaholo, M. Risfan. "Politik Kebenaran dalam Konteks dan Kekuasaan", <https://tajdid.id/2021/09/14/kebenaran-dalam-konteks-politik-dan-kekuasaan/>, diakses 21 Februari 2020.

Hardiman, F. Budi. "Homo Digitalis" Kompas, 1 Maret 2018.

_____. "Pentingnya Kebenaran" Kompas, 30 November 2018.

_____. "Tugas Filsafat di Era Komunikasi Digital" Nalar Politik.com,

Sudibyo, Agus "Eksistensi Media Masa Nasional" Kompas, 12 Februari 2018.

Jurnal

Chambers, Simone. "Truth, Deliberative Democracy, and the Virtues of Accuracy: Is Fake News Destroying the Public Sphere?", *Journal of Political Study Association*, 28:2 California, 2020.

Hamka. Syamsuar, "Studi Kritis Pemikiran Fisika Modern Stephen Hawking Menurut Filsafat Pendidikan Islam", *Tawazun Jurnal Pendidikan Islam*, 12: 1 Makasar: Juni, 2019.

Mirsel, Robert. "Membentuk Imam Berkualitas Lewat Filsafat Menurut Ratio Fundamental Nationalis, 1987", *Jurnal Ledalero*. Vol 4, No. 2, Ledalero: Desember, 2005.

Kote. Yosep Keladu, "Berwaspada Bersama Paus", *Jurnal Ledalero*, 6:2 Ledalero, Desember 2007.

Wahyuni, Dwi, dkk. "Filsafat Perennial Dan Dialog Agama: Studi Pemikiran Seyyed Hossein Nasr", *Jurnal Al-Aqidah*. Vol 13, No. 1, Padang: Juni 2021.